

ABSTRAK

Keselamatan dan keamanan wisatawan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan kepariwisataan, terutama pada kegiatan wisata pendakian yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dalam praktiknya, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan pendakian masih kerap menemui kendala dan pelanggaran yang dapat membahayakan wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai apakah SOP keselamatan pendakian telah dilaksanakan oleh pengelola serta bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wisata pendakian di Gunung Rinjani.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan dan keselamatan pendakian, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung pembahasan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP keselamatan pendakian di Gunung Rinjani belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan terhadap pemandu wisata serta masih ditemukannya pemandu yang belum memiliki lisensi resmi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran SOP telah dilakukan melalui sanksi administratif, seperti blacklist terhadap pemandu wisata dan pembekuan akun trekking operator, namun upaya tersebut masih cenderung represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata agar keselamatan wisatawan dapat terjamin secara maksimal.

Kata kunci: Keamanan dan Keselamatan, SOP, Pendakian, Gunung Rinjani

ABSTRACT

Tourist safety and security is a key element in organizing tourism, especially in climbing tourism activities which have a high level of risk. In practice, the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for climbing safety still often encounters obstacles and violations that can endanger tourists. Based on this, this study raises the issue of whether the climbing safety SOP has been implemented by the managers and what form of law enforcement is taken against violations committed by climbing tourism managers on Mount Rinjani.

This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations related to tourism and climbing safety, secondary legal materials in the form of scientific books and journals, and tertiary legal materials that support the discussion. The legal materials were collected through literature studies, then analyzed prescriptively to provide arguments for the research results.

The research results show that the implementation of safety SOPs for climbing Mount Rinjani has not been optimal. This is evident in the weak supervision of tour guides and the continued presence of guides without official licenses. Law enforcement against SOP violations has been carried out through administrative sanctions, such as blacklisting tour guides and freezing trekking operator accounts, but these efforts still tend to be repressive. Therefore, strengthening preventive supervision, improving the quality of human resources, and more effective coordination between the central government, regional governments, and tourism operators is needed to ensure maximum tourist safety.

Keywords: *Safety and Security, SOP, Climbing, Mount Rinjani*